

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peratiran Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, maka dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP) Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 perlu disusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam Renja Perangkat Daerah memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan. Penyusunan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah diharuskan berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah hal ini bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta perkiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah. Sementara itu, dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah juga perlu berpedoman kepada hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Penyusunan Renja Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 juga mengacu kepada Renstra Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023 dan Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2021. Selain itu, dalam penyusunan Renja Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 juga mengacu kepada Rencana Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia (BKPM RI) dan berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Renja Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 disusun sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

(RAPBD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang dijabarkan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat Tahun 2021.

1.2. LANDASAN HUKUM

Peraturan perundang-undangan yang melatarbelakangi penyusunan Renja Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 antara lain sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
13. Peraturan Presiden Nomor Tahun Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah Provinsi Jawa Barat 2010;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;
19. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 62 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat;
20. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor Tahun tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2020.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari penyusunan Renja Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 yaitu untuk merumuskan program dan kegiatan yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja, sesuai dengan tugas, fungsi dan rincian tugas unit dan tata kerja Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat Tahun 2021.

Sementara, tujuan dari penyusunan Renja Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 adalah sebagai acuan bagi Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat dalam megoperasionalisasikan RKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai VISI MISI Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023.

1.4. SISTIMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Renja Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun sekurang-kurangnya disusun menurut sistematika sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dalam proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APDB tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Perangkat Daerah, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyerenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, tanyangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah dan Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.5. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut

dilakukan, penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

2.6. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.2. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan dan uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

Berisikan uraian penutup berupa catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019 DAN CAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah merupakan salah satu siklus perencanaan pembangunan perangkat daerah yang diawali dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian sampai dengan evaluasi hasil. Evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dilakukan setiap triwulan berdasarkan data realisasi kinerja dan anggaran tahun berjalan. Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi kepada Gubernur melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) setiap triwulan dalam tahun anggaran berkenaan, untuk selanjutnya dilakukan evaluasi. Bila berdasarkan hasil evaluasi oleh Bappeda ditemukan adanya ketidaksesuaian/penyimpangan, maka Kepala Perangkat Daerah melakukan tindakan perbaikan/penyempurnaan.

Memasuki tahun pertama pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023, dilakukan evaluasi pelaksanaan Renja Tahun 2019. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Perangkat Daerah dapat dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah, serta sasaran dan prioritas pembangunan tahunan daerah.

Tujuan Renja Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 yaitu “Meningkatnya Investasi Berkualitas Berkelanjutan”. Tujuan tersebut dijabarkan kembali ke dalam dua sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya Realisasi Investasi
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan sesuai Standar Pelayanan Publik

Kedua sasaran dimaksud, dapat dicapai oleh 5 (lima) program dan 52 (lima puluh dua) kegiatan pada tahun 2019. Dalam mencapai sasaran meningkatnya realisasi investasi dilaksanakan melalui satu program, sedangkan untuk mencapai sasaran meningkatnya kualitas pelayanan perizinan sesuai standar pelayanan publik dilaksanakan melalui empat program. Pencapaian kinerja dan anggaran Tahun 2019 dalam mencapai sasaran secara lebih lengkap disajikan dalam Table 2.1.

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tahun 2019

No	Sasaran	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%

1	Meningkatnya Realisasi Investasi	Rp 154 T	Rp 162,8 T	106	Rp 4.011.429.914	Rp 3.649.007.661	91
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan sesuai Standar Pelayanan Publik	78	81,26	104	Rp 31.870.118.998	Rp 29.473.731.274	92

Berdasarkan hasil pelaksanaan evaluasi Renja Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 rata-rata capaian kinerja dan anggaran dari seluruh program mencapai 88,79 persen dengan rata-rata capaian perprogram sebesar 88,67 persen. Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2019 sebesar Rp 33.122.738.938 atau mencapai 92,31 persen dari keseluruhan pagu anggaran belanja langsung. Pencapaian tersebut didorong oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Perencanaan kegiatan dan penganggaran yang sesuai
2. Dukungan dari Tim Teknis untuk peningkatan pelayanan perizinan
3. Komitmen yang kuat dan kerjasama yang baik antara pimpinan dan staf untuk melaksanakan seluruh kegiatan

Namun terdapat juga beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan program/kegiatan Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 antara lain kurangnya ketersediaan aparatur dalam penyusunan program/kegiatan, kurangnya pemahaman aparatur dalam penyusunan perencanaan program/kegiatan dan penganggaran, komponen *e-budgeting* yang terlalu detail membuat pelaksanaan kegiatan tidak fleksibel.

Table 2.1
Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan
Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat Tahun 2019

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (rupiah)	REALISASI	
			ANGGARAN	%
I	Program Peningkatan Investasi Daerah	4,011,429,914	3,649,007,661	91
1	Pembuatan/Produksi Audio Visual dan Placement ILM Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Media Elektronik dan Media Sosial	149,999,836	148,711,822	99
2	Fasilitasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	99,859,809	90,212,693	90
3	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	149,444,282	144,960,943	97
4	Kegiatan Penyusunan Bahan, Sarana dan Prasarana Promosi PMPTSP	196,179,555	185,268,430	94
5	Kegiatan Pelaksanaan Promosi PMPTSP	1,022,409,877	913,228,692	89
6	Kegiatan Pelaksanaan Kerjasama dan Pemberdayaan Usaha PMPTSP	148,916,975	129,555,461	87

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (rupiah)	REALISASI	
			ANGGARAN	%
7	Kegiatan Penyusunan Regulasi PMPTSP	598,755,380	525,088,578	88
8	Kegiatan Evaluasi dan Monitoring Potensi Peluang Investasi yang Diminati Investor	99,365,057	87,904,548	88
9	Penanganan Permasalahan Pelaksanaan Penanaman Modal Bagi Perusahaan PMA/PMDN di Jawa Barat	199,991,672	185,485,522	93
10	Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal Bagi Perusahaan PMA/PMDN di Jawa Barat	249,993,164	240,588,552	96
11	Pemantauan dan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal Bagi Perusahaan PMA/PMDN di Jawa Barat	299,995,387	275,327,387	92
12	Kegiatan Rekonsiliasi Data Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	149,997,041	139,153,250	93
13	Pelaksanaan Promosi Melalui Media Elektronik ("Business Corner" Talkshow)	99,516,649	88,815,680	89
14	Kegiatan Pembangunan/Pengembangan Investment Marketplace	247,647,864	215,993,868	87
15	Kegiatan Promosi Media Sosial, Email Marketing, dan E-NewsLetter	149,987,374	140,950,235	94
16	Kegiatan Penyusunan Peta Potensi Peluang Investasi di Jawa Barat	149,342,990	137,762,000	92
II	Program Peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	5,616,717,935	5,425,259,284	97
1	Pembuatan Bahan/Data Cetakan Terkait Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	99,999,894	94,719,000	95
2	Pelaksanaan Pengawasan Pasca Penerbitan Izin/Non Izin Sektoral	149,997,400	148,932,520	99
3	Monitoring Proses Penerbitan Izin/Non Izin Sektoral	99,993,933	97,824,458	98
3	Penanganan Proses Permasalahan Perizinan	199,999,480	167,531,950	84
4	Peninjauan Lapangan Bersama Tim Teknis Pelayanan Perizinan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	1,499,687,373	1,476,496,788	98
5	Rapat Berkala Teknis Perizinan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	99,752,784	80,761,855	81
6	Pelaksanaan Peninjauan Lapangan Bersama Tim Teknis Pelayanan Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Infrastruktur dan Sosial	1,453,999,528	1,488,555,180	102
7	Rapat Koordinasi Tim Teknis Perizinan Bidang Infrastruktur dan Sosial	40,000,000	13,715,050	34
8	Kegiatan Pengembangan Integrasi Data Dengan Sistem Aplikasi Lainnya	599,999,918	589,132,200	98
9	Kegiatan Forum Replikasi dan Monitoring Sistem Aplikasi	99,969,780	92,239,710	92
10	Pengembangan Sistem Call Center Pelayanan Perizinan	499,980,350	487,176,850	97
11	Kegiatan Pengembangan Sistem Pelaporan Penanaman Modal dan Perizinan Pada Aplikasi SIMPATIK	99,982,462	94,965,000	95

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (rupiah)	REALISASI	
			ANGGARAN	%
12	Kegiatan Pembuatan Sistem Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat	99,966,289	98,683,750	99
13	Kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	285,516,460	279,548,000	98
14	Kegiatan Sertifikasi ISO Pelayanan Perizinan	187,872,412	185,871,000	99
15	Kegiatan Pengembangan Tata Kelola Kearsipan	99,999,872	69,105,973	69
III	Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi Serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1,342,803,990	1,199,518,190	89
1	Kegiatan Evaluasi Data, Pelaporan Investasi dan Perizinan	221,107,576	213,042,750	96
2	Forum Perangkat Daerah	233,711,819	231,792,836	99
3	Kegiatan Penyelenggaraan Forum Perencanaan Tingkat Daerah (Pra Musrenbang, Musrenbang, Musrenbangnas, Pertemuan Regional dan Nasional)	366,427,400	280,680,174	77
4	Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan Dinas PMPTSP	46,052,500	46,030,192	100
5	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan 2020	89,992,800	68,407,812	76
6	Penyelenggaraan Pameran Laporan Kegiatan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	57,355,860	55,483,900	97
7	Kegiatan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	53,948,257	42,480,329	79
8	Penatausahaan Keuangan dan Aset Dinas PMPTSP	79,933,696	79,879,550	100
9	Musyawarah Koordinasi Teknis Kerjasama 3 Provinsi	194,274,082	181,720,647	94
IV	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2,800,838,753	2,702,943,920	97
1	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas PMPTSP	2,800,838,753	2,702,943,920	97
V	Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	22,109,758,320	20,146,009,880	91
1	Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor	2,491,606,471	2,297,712,090	92
2	kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya	1,753,967,152	1,605,978,554	92
3	Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	420,000,000	357,539,091	85
4	Kegiatan Renovasi Gedung Kantor Dinas PMPTSP	7,018,785,000	6,737,418,500	96
5	Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor	3,463,071,910	3,063,018,221	88
6	Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga Serta Pakaian Aparatur	997,900,000	956,561,300	96
7	Kegiatan Penyediaan Diklat, Kursus Singkat dan Bimtek Aparatur	412,500,000	304,950,000	74
8	Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor dan Tenaga Kerja Non Pegawai	2,879,101,164	2,411,496,390	84

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JUMLAH ANGGARAN (rupiah)	REALISASI	
			ANGGARAN	%
9	Kegiatan Peningkatan Kemampuan dan Kompetensi Aparatur Dinas PMPTSP	679,410,280	606,225,000	89
10	Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor	1,993,416,343	1,805,110,734	91
	TOTAL ANGGARAN	35,881,548,912	33,122,738,935	92

Adapun rekomendasi/saran sebagai tindak lanjut evaluasi hasil dari Bappeda Provinsi Jawa Barat bagi pelaksanaan Renja Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 yaitu perlu mengikutsertakan aparatur penyusun program/kegiatan, dalam Diklat yang berkaitan dengan perencanaan dan penganggaran dan merumuskan komponen e-budgeting yang fleksibel dalam pelaksanaan kegiatan.

Dalam Renstra Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023 terdapat perbedaan program/kegiatan pada tahun 2019 dengan tahun 2020, dimana program/kegiatan pada tahun 2019 berjumlah 5 program dan 52 kegiatan. Sementara itu, sesuai dengan arahan Kementerian Dalam Negeri agar setiap bidang pada Perangkat Daerah memiliki satu program yang kinerjanya dapat terukur. Oleh karenanya, pada tahun 2020 Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat memiliki 9 program dan 52 kegiatan, dimana 2 program merupakan program yang bersifat fixed cost. Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 dan pencapaian Renstra Dinas PMPTSP sampai dengan Tahun 2020 disajikan secara lengkap pada Tabel 2.3.

Tabel 2.3
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d Tahun 2020
Provinsi Jawa Barat

Nama Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/4)
1	Urusan Pemerintahan Wajib									
1	18	01								
1	18	01	106	Program Peningkatan Investasi Daerah	Jumlah Perusahaan PMA-PMDN yang Patuh Terhadap Kewajiban LKPM					
001	Pembuatan/Produksi Audio Visual dan Placement ILM Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Media Elektronik dan Media Sosial		Jumlah ILM	1 Produk/Tayangan	-	1	1	100%	-	-
002	Fasilitasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Fasilitasi Pelayanan Penanaman Modal dan PTSP	15 Kali	-	15	14	93%	-	-
003	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		Jumlah Kegiatan Sosialisasi	2 Kali	-	2	2	100%	-	-
004	Kegiatan Penyusunan Bahan, Sarana dan Prasarana Promosi PMPTSP		Jumlah Bahan Sarana Prasarana Promosi	2 Paket	-	2	2	100%	-	-
005	Kegiatan Pelaksanaan Promosi PMPTSP		Laporan Hasil Pelaksanaan Promosi	1 Kegiatan	-	1	1	100%	-	-
006	Kegiatan Pelaksanaan Kerjasama dan Pemberdayaan Usaha PMPTSP		Jumlah Kesepakatan	3 Dokumen MoU/Lol	-	3	3	100%	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/4)
007	Kegiatan Penyusunan Regulasi PMPTSP	Jumlah Regulasi	1 Dokumen	-	1	1	100%	-	-	-
008	Kegiatan Evaluasi dan Monitoring Potensi Peluang Investasi yang Diminati Investor	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi	27 Kab/Kota	-	27	24	89%	-	-	-
009	Penanganan Permasalahan Pelaksanaan Penanaman Modal Bagi Perusahaan PMA/PMDN di Jawa Barat	Jumlah Perusahaan yang Difasilitasi Penanganan Permasalahan Penanaman Modal dalam rangka Realisasi Investasi	50 Perusahaan	-	50	46	92%	-	-	-
010	Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal Bagi Perusahaan PMA/PMDN di Jawa Barat	Jumlah Perusahaan yang Dilakukan Pengawasan	100 Perusahaan	-	100	96	96%	-	-	-
011	Pemantauan dan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal Bagi Perusahaan PMA/PMDN di Jawa Barat	Jumlah Perusahaan yang Dilakukan Pemantauan dan/atau Pembinaan Ketentuan Pelaksanaan Penanaman Modal	200 Perusahaan	-	200	184	92%	-	-	-
012	Kegiatan Rekonsiliasi Data Penanaman Modal dan Pelayanan Teradu Satu Pintu	Data Penanaman Modal dan PTSP	20 Sektor	-	20	19	95%	-	-	-
013	Pelaksanaan Promosi Melalui Media Elektronik ("Business Corner" Talkshow)	Jumlah Pelaksanaan Business Talkshow	1 Media Elektronik	-	1	1	100%	-	-	-
014	Kegiatan Pembangunan/Pengembangan Investment Marketplace	Aplikasi Media Promosi Digital	1 Aplikasi	-	1	1	100%	-	-	-
015	Kegiatan Promosi Media Sosial, Email Marketing, dan E-Newsletter	Tersebaranya Rich/Engagement Peluang Investasi di Media Digital	1000 Rich/Engagement	-	1000	940	94%	-	-	-
016	Kegiatan Penyusunan Peta Potensi Peluang Investasi di Jawa Barat	Kajian Prospektus Investasi di Jawa Barat	1 Dokumen	-	1	1	100%	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan				
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/4)			
1	18	01	107	Program Peningkatan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Presentase Penyelesaian Izin Tepat Waktu	40 Persen	-	40	40	100%	-	-	-
	001			Pembuatan Bahan/Data Cetak terkait Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Bahan Cetak	2 Bahan Cetak	-	2	2	100%	-	-	-
	002			Pelaksanaan Pengawasan Pasca Penerbitan Izin/Non Izin Sektoral	Jumlah Objek Pemilik Izin yang Dilakukan Pengawasan Ketentuan Sektoral	50 Objek Izin	-	50	50	100%	-	-	-
	003			Monitoring Proses Penerbitan Izin/Non Izin Sektoral	Jumlah Pemohon Perizinan/Komitmen yang dilakukan Pemantauan Proses Perizinan	50 Pemohon Izin	-	50	49	98%	-	-	-
	004			Penanganan Proses Permasalahan Perizinan	Jumlah Fasilitasi Pengaduan yang menjadi permasalahan perizinan	100 Permasalahan	-	100	84	84%	-	-	-
	005			Peninjauan Lapangan Bersama Tim Teknis Pelayanan Perizinan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Jumlah Peninjauan Lapangan yang dilaksanakan	520 Kali	-	520	512	98%	-	-	-
	006			Rapat Berkala Teknis Perizinan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Jumlah Rapat yang Dilaksanakan	1200 Kali	-	1200	972	81%	-	-	-
	007			Pelaksanaan Peninjauan Lapangan Bersama Tim Teknis Pelayanan Perizinan Bidang Pelayanan Perizinan Infrastruktur dan Sosial	Jumlah Peninjauan Lapangan yang dilaksanakan	400 Kali	-	400	399	100%	-	-	-
	008			Rapat Koordinasi Tim Teknis Perizinan Bidang Infrastruktur dan Sosial	Jumlah Rapat yang Dilaksanakan	700 Kali	-	700	240	34%	-	-	-
	009			Kegiatan Pengembangan Integrasi Data Dengan Sistem Aplikasi Lainnya	Sinkronisasi Data Terstruktur	1 Database	-	1	1	100%	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan				
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/4)			
010	Kegiatan Forum Replikasi dan Monitoring Sistem Aplikasi	Tingkat Keselarasan Aplikasi yang direplikasi	1 Kegiatan	-	1	1	100%	-	-	-			
011	Pengembangan Sistem Call Center Pelayanan Perizinan	Jumlah Informasi Pengaduan Masyarakat Melalui Call Center	2500 orang	-	2500	2436	97%	-	-	-			
012	Kegiatan Pengembangan Sistem Pelaporan Penanaman Modal dan Perizinan Pada Aplikasi SIMPATIK	Modul Aplikasi Pelaporan	1 Aplikasi	-	1	1	100%	-	-	-			
013	Kegiatan Pembuatan Sistem Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat	Aplikasi SKM	2 Aplikasi	-	2	2	100%	-	-	-			
014	Kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat	2 Dokumen	-	2	2	100%	-	-	-			
015	Kegiatan Sertifikasi ISO Pelayanan Perizinan	Kegiatan Sertifikasi ISO Pelayanan Perizinan	1 Dokumen	-	1	1	100%	-	-	-			
016	Kegiatan Pengembangan Tata Kelola Kearsipan	Data Arsip Digital	8000 Data	-	8000	5528	69%	-	-	-			
1	18	1	18	Program Penyusunan Rencana, Pengendalian dan Evaluasi Serta Pelaporan Capaian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Tingkat Kesesuaian Pelaporan Kinerja dan Keuangan Dinas PMPTSP	100 Persen	-	100	100	100%	-	-	-
001	Kegiatan Evaluasi Data, Pelaporan Investasi dan Perizinan	Jumlah Dokumen Data Pelaporan Investasi dan Perizinan	5 Dokumen	-	5	5	100%	-	-	-			
002	Forum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Forum Perangkat Daerah	1 Kali	-	1	1	100%	-	-	-			
003	Kegiatan Penyelenggaraan Forum Perencanaan Tingkat Daerah (Pra Musrenbang, Musrenbang, Musrenbangnas, Pertemuan Regional dan Nasional)	Jumlah Forum Perencanaan	10 Kali	-	10	8	80%	-	-	-			

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/4)
004	Monitoring dan Evaluasi Program/Kegiatan Dinas PMPTSP	Pelaksanaan Monitoring Program/Kegiatan	1 Tahun	-	1	1	100%	-	-	-
005	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan 2020	Jumlah Dokumen Perencanaan	6 Dokumen	-	6	5	83%	-	-	-
006	Penyelenggaraan Pameran Laporan Kegiatan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	Penyelenggaraan Pameran LKPJ	1 Kali	-	1	1	100%	-	-	-
007	Kegiatan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Dokumen yang dihasilkan	8 Dokumen	-	8	6	75%	-	-	-
008	Penatausahaan Keuangan dan Aset Dinas PMPTSP	Dokumen yang dihasilkan	1 Dokumen	-	1	1	100%	-	-	-
009	Musyawarah Koordinasi Teknis Kerjasama 3 Provinsi	Terselenggaranya Kegiatan Musyawarah Koordinasi Teknis Kerjasama 3 Provinsi	1 Kali	-	1	1	100%	-	-	-
1	18	1	19	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu						
001	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas PMPTSP	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja Dinas PMPTSP	100 Persen	-	100	100	100%	-	-	-
001	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas PMPTSP	Penyediaan Kegiatan dan Kebutuhan Rohani, Sarana Olahraga dan Pakaian Dinas	12 Bulan	-	12	12	100%	-	-	-
1	18	1	19	Program Pendukung Administrasi Perkantoran Pemerintah Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu						
001	Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor	Persentase Pegawai yang Terpenuhi Kebutuhan Kesejahteraan Sesuai Peraturan Perundang-undangan Lingkup Dinas PMPTSP	70 Persen	-	70	70	100%	-	-	-
001	Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor	Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor	12 Bulan	-	12	12	100%	-	-	-
002	kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan Beserta Peralatannya	Penyediaan Tenaga Keamanan, Kebersihan dan Peralatannya	12 Bulan	-	12	12	100%	-	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2019	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan Tahun 2018	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu			Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2020)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2019	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10= (5+7+9)	11=(10/4)
003	Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas yang Dipelihara	54 Kendaraan	-	54	46	85%	-	-	-
004	Kegiatan Renovasi Gedung Kantor Dinas PMPTSP	Renovasi Gedung Kantor Dinas PMPTSP	1 Gedung	-	1	1	100%	-	-	-
005	Kegiatan Penyediaan Rapat Internal dan Luar Kantor	Pelaksanaan Rapat Internal dan Luar Kantor Penyediaan Perjalanan Dinas	12 Bulan	-	12	12	100%	-	-	-
006	Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga Serta Pakaian Aparatur	Penyediaan Kegiatan dan Kebutuhan Rohani, Sarana Olahraga dan Pakaian Dinas	12 Bulan	-	12	12	100%	-	-	-
007	Kegiatan Penyediaan Diklat, Kursus Singkat dan Bimtek Aparatur	Jumlah Peserta Diklat/Kursus Singkat/Bimtek Aparatur	150 Orang	-	150	111	74%	-	-	-
008	Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor dan Tenaga Kerja Non Pegawai	Tersedianya Kebutuhan Langganan Kantor	12 Bulan	-	12	12	100%	-	-	-
009	Kegiatan Peningkatan Kemampuan dan Kompetensi Aparatur Dinas PMPTSP	Jumlah Aparatur Dinas PMPTSP yang Lulus Diklat dengan Predikat minimal Memuaskan	130 Orang	-	130	116	89%	-	-	-
010	Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor	Penyediaan Barang Habis Pakai	12 Bulan	-	12	12	100%	-	-	-

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2016, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat merupakan Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, meliputi pengembangan iklim penanaman modal, promosi penanaman modal, pelayanan penanaman modal, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, data dan sistem informasi penanaman modal, serta pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugas. Sementara itu, fungsi Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat, antara lain:

1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu, yang menjadi kewenangan Provinsi;
2. Penyelenggaraan pengelolaan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu yang menjadi kewenangan Provinsi;
3. Penyelenggaraan Administrasi Dinas;
4. Penyelenggaraan Evaluasi dan Pelaporan Dinas; dan
5. Penyelenggaraan Fungsi Lain Sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023 memuat tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah. Tujuan dan sasaran yang sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat terdapat tujuan dari misi ke 4 (empat) yaitu “Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas dan Berdaya Saing serta Mengurangi Disparitas” dengan sasaran “Meningkatnya Kualitas Iklim Usaha dan Investasi” dengan indikator tujuan/sasaran Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) ADHB. Adapun strategi dalam pencapaian tujuan dan sasaran tersebut adalah dengan meningkatkan investasi daerah.

Maka dengan mengacu kepada hal tersebut, dalam Renstra Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023 yang telah ditetapkan, indikator kinerja kunci Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat untuk 5 (lima) tahun mendatang yaitu nilai realisasi investasi dan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan.

Capaian kinerja pelayanan Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 terkait dengan nilai realisasi investasi sampai dengan triwulan ketiga mencapai Rp 102,01 triliun dengan realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 66,43 triliun dan realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mencapai Rp 35,65 triliun. Angka realisasi investasi di triwulan ke empat diharapkan dapat melonjak naik secara signifikan, sehingga target realisasi investasi tahun 2019 yang telah ditetapkan

dalam Renstra Dinas PMPTSP Tahun 2018 – 2023 dapat tercapai. Sementara itu, jumlah penyerapan tenaga kerja sampai dengan triwulan ketiga tahun 2019 sebanyak 96.592 orang.

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan perizinan pada tahun 2019 adalah 81,62 dengan peringkat mutu pelayanan “B” dan kategori pelayanan “BAIK”. Nilai realisasi IKM pada tahun 2019 berada jauh diatas target yang telah ditetapkan sebesar 78. Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan perizinan pada tahun 2019 didorong oleh beberapa hal sebagai berikut yaitu Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat ditetapkan sebagai Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan Kategori PRIMA (Nilai A) dan sebagai Unit Kerja Pelayanan Dengan Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) oleh Kemenpan RB. Selain itu juga, penyelenggaraan perizinan Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat telah memperoleh sertifikasi Standar Internasional ISO 9001:2015 pada tahun 2019. Dengan pencapaian-pencapaian tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan perizinan Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat kedepannya.

Tabel 2.4
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Jawa Barat

No	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Satuan	Target					Realisasi Capaian					Catatan Analisis
					Th. 2019	Th. 2020	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023	Th. 2019	Th. 2020	Th. 2021	Th. 2022	Th. 2023	
1	Nilai Realisasi Investasi	N/A	N/A	Triliun Rupiah	107,00 - 115,06	112,27 - 120,27	117,48 - 125,48	122,69 - 130,69	127,90 - 135,90	102,01					angka sampai dengan TW III 2019
2	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Perizinan	N/A	N/A	Poin	78	79	80	81	82	81.62					Mutu Pelayanan "B"

2.3. ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Salah satu tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu melakukan pelayanan publik dibidang pelayanan perizinan baik di level provinsi maupun di Kabupaten/Kota. Dalam rangka peningkatan sistem pelayanan perizinan Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik melalui penerapan Aplikasi *Online Single Submission* (OSS). Penerapan sistem OSS diharapkan dapat mempercepat dan menyederhanakan proses pelayanan perizinan dengan mengurangi proses birokrasi sehingga mempermudah para pelaku usaha untuk mendapatkan izin berusaha di Indonesia.

Digitalisasi sistem pelayanan perizinan melalui penerapan OSS selanjutnya diharapkan mampu meningkatkan iklim investasi di Indonesia yang pada akhirnya dapat mendongkrak daya saing Indonesia. Daya saing suatu daerah merupakan hal yang sangat penting bagi investor untuk menentukan keputusan berinvestasi. Investor cenderung akan memilih daerah yang lingkungan bisnis dengan kebijakan yang ramah, sehingga menjadikan investor menanam investasinya dengan risiko yang dapat dikelola dan terkontrol. Sehingga pada akhirnya dengan perbaikan sistem perizinan diharapkan dapat meningkatkan realisasi investasi di Indonesia.

Namun dalam pelaksanaannya sampai saat ini dirasa masih belum cukup untuk mewujudkan realisasi penanaman modal sesuai dengan yang diharapkan. Hal tersebut karena terdapat beberapa kendala yang dihadapi baik oleh pelaku usaha maupun oleh pemerintah daerah terkait sistem OSS baik dalam regulasi maupun sistemnya. Adapun beberapa isu-isu penting yang perlu menjadi perhatian khusus bagi pemerintah dalam penyelenggaraan perizinan antara lain:

1. Pemerintah perlu segera menerbitkan kebijakan terkait dengan kelembagaan PTSP di daerah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri dalam rangka debirokratisasi pelayanan perizinan. Hal ini karena adanya beberapa NSPK sebagai peraturan pelaksanaan PP No. 24 Tahun 2018 dalam mekanismenya pelayanannya tidak mewajibkan prosesnya melalui Dinas PMPTSP tetapi langsung melalui perangkat daerah teknis;
2. Mendorong kejelasan, kepastian dan harmonisasi kebijakan terkait penyelenggaraan pelayanan perizinan melalui sistem OSS, baik regulasi maupun sistemnya secara konsisten tidak selalu berubah-ubah;
3. Mendorong pemerintah dalam hal sinergitas antara Kementerian/Lembaga dengan daerah dalam mewujudkan deregulasi pelayanan perizinan baik berupa NSPK ataupun rencana

penerbitan omnibuslaw yang sesuai dengan maksud dan tujuan diterbitkannya PP No 24 Tahun 2018 dengan melibatkan pemerintah daerah.

4. Meningkatkan optimalisasi dan sinkronisasi peran perencanaan dan pengembangan potensi penanaman modal dari BKPM terhadap daerah dalam bentuk program dekonsentrasi yang nyata sehingga potensi dan realisasi penanaman modal di daerah dapat optimalkan dengan baik.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Setelah pengimplementasian Sistem Informasi Perencanaan dan Penganggaran secara online di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, pemerintah di Kabupaten/Kota, anggota dewan dan masyarakat umum dapat secara langsung mengusulkan usulan program dan kegiatan untuk perangkat daerah. Hasil usulan tersebut kemudian dibahas dalam Musrenbang Kabupaten/Kota. Berdasarkan hasil Musrenbang Kabupaten/Kota terdapat beberapa usulan langsung kepada Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat dari Kabupaten/Kota di Jawa Barat. Sebagian besar usulan terkait dukungan pembangunan terhadap pembangunan Mall Pelayanan Publik di

beberapa Kabupaten/Kota. Namun pengusulan tersebut belum dilengkapi dengan perencanaan secara mendetail, sehingga usulan tersebut masih belum dapat kami tindaklanjuti lebih lanjut.

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Visi Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Periode 2020 – 2024 yang merupakan tema pembangunan tahun 2020 – 2024, yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi Misi Presiden tersebut dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 – 2024, sasaran pembangunan jangka menengah tahun 2020 – 2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Sejalan dengan arah kebijakan nasional, peningkatan inovasi dan kualitas penanaman modal merupakan modal utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkelanjutan dan menyejahterakan secara adil dan merata. Dengan memperhatikan hal tersebut, BKPM telah menetapkan dua arah kebijakan dan startegi yang akan dilakukan pada masing-masing arah kebijakan yang tertuang dalam Renstra BKPM Tahun 2020 – 2024 yaitu:

1. Arah kebijakan pertama : peningkatan inovasi dalam rangka pencapaian target penanaman modal. Arah kebijakan ini ditujukan untuk mengoptimalkan pencapaian target realisasi penanaman modal. Upaya tersebut perlu dilakukan secara inovatif, baik pada tataran perencanaan, peningkatan iklim, kerjasama, promosi, layanan, pengendalian pelaksanaan penanaman modal, maupun tata kelola internal. Adapun strategi yang akan ditempuh pada arah kebijakan ini adalah sebagai berikut :
 - a. Meningkatkan perencanaan penanaman modal terintegrasi yang berbasis kepentingan nasional dan sesuai kebutuhan penanam modal (*investor needs*)
 - b. Meningkatkan iklim penanaman modal yang berdaya saing
 - c. Meningkatkan efektivitas kerjasama penanaman modal
 - d. Meningkatkan efektivitas promosi penanaman modal
 - e. Meningkatkan kualitas pelayanan penanaman modal
 - f. Meningkatkan kualitas pengendalian pelaksanaan penanaman modal
 - g. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik

2. Arah kebijakan kedua : peningkatan penanaman modal yang berkualitas dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Selain mengoptimalkan peningkatan realisasi penanaman modal (PMA dan PMDN) melalui kebijakan inovatif, kebijakan penanaman modal tahun 2020 – 2024 juga diarahkan pada peningkatan kualitas penanaman modal. Penanaman modal yang berkualitas bukan dilihat dari besarnya nilai penanaman modal yang ditanamkan melainkan dari dampak yang ditimbulkan terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan rakyat, serta keberlanjutan lingkungan. Adapun strategi yang akan ditempuh pada arah kebijakan ini adalah sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan penanaman modal di bidang usaha yang banyak menyerap tenaga kerja
 - b. Meningkatkan produktivitas penanaman modal
 - c. Meningkatkan penanaman modal yang melakukan transfer pengetahuan dan teknologi
 - d. Meningkatkan daya saing dan akses pasar
 - e. Meningkatkan penanaman modal pada industry yang berorientasi ekspor dan industri substitusi impor
 - f. Meningkatkan penanaman modal yang berwawasan lingkungan dan memiliki dampak sosial yang besar
 - g. Meningkatkan optimalisasi penggunaan sumber daya alam di dalam negeri

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Rencana kerja Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Renstra Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023. Mengacu kepada Renstra Dinas PMTSP Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023 tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat selama lima tahun mendatang yaitu meningkatnya investasi yang berkualitas dan berkelanjutan melalui peningkatan laju pertumbuhan investasi PMA dan PMDN. Sementara itu, sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023 yaitu 1) Meningkatnya Realisasi Investasi PMA dan PMDN dan 2) Meningkatnya Kualitas Pelayanan Perizinan sesuai Standar Pelayanan Publik.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran dimaksud, Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat telah merumuskan strategi dan arah kebijakan sebagaimana telah tertuang di dalam Renstra Dinas PMTSP Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023. Adapun strategi yang akan dilaksanakan antara lain:

1. Mengembangkan potensi dan peluang investasi;
2. Memberikan kemudahan berinvestasi di Jawa Barat;
3. Meningkatkan efektivitas sinergi dan upaya promosi investasi;

4. Menciptakan iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif dengan fasilitasi penanganan permasalahan penanaman modal;
5. Peningkatan jumlah perusahaan yang dapat memenuhi kewajibannya melaporkan LKPM;
6. Membuat regulasi teknis pelaksanaan pelayanan pengelolaan izin-izin strategis;
7. Menerapkan pola *online system* dalam memberikan pelayanan perizinan;
8. Meningkatkan sinergitas dengan Perangkat Daerah teknis;
9. Meningkatkan kualitas aparatur PTSP;
10. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan perizinan

Arah kebijakan Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat dalam rangka meningkatkan realisasi investasi dan meningkatkan kualitas pelayanan perizinan untuk lima tahun mendatang, antara lain:

1. Mengoptimalkan fungsi pemusatan basis data potensi investasi dan pengolahan informasi peluang investasi;
2. Menciptakan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan dengan pusat dan daerah;
3. Memperluas penyebaran informasi potensi, promosi, peluang investasi dan prosedur pelaksanaan penanaman modal di Jawa Barat melalui berbagai media;
4. Melaksanakan pengawasan dan evaluasi, inventarisasi, identifikasi dan penyelesaian permasalahan pelaksanaan penanaman modal;
5. Pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan PMA & PMDN;
6. Melaksanakan penyederhanaan, standarisasi prosedur dan pengembangan proses perizinan secara paralel;
7. Mengembangkan aplikasi pelayanan perizinan dan non perizinan;
8. Melaksanakan koordinasi dengan perangkat daerah terkait;
9. Pemenuhan sumber daya aparatur sesuai dengan standar kompetensi dan peningkatan kapasitas;
10. Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan perizinan.

3.3. PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat dan sebagai bagian dari pencapaian MISI ke empat Pemerintah Provinsi Jawa Barat yaitu *“Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Usaha Ekonomi Umat yang Sejahtera dan Adil melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat – Pusat Inovasi serta Pelaku Pembangunan”*. Selain itu, dengan mengacu kepada Renstra Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023 yang telah ditetapkan, pada tahun anggaran 2021 Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat akan melaksanakan 9 (sembilan) program yang diterjemahkan ke dalam 79 kegiatan.

Program yang akan dilaksanakan oleh Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat pada tahun 2021, sebagai berikut:

1. Program Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal;
2. Program Pengendalian Penanaman Modal;
3. Program Penataan Regulasi PMPTSP;
4. Program Pelayanan Perizinan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
5. Program Pelayanan Perizinan Bidang Infrastruktur dan Sosial;
6. Program Pengendalian dan Penanganan Permasalahan Perizinan;
7. Program Data dan Informasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
9. Program Dukungan Manajemen Perkantoran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Rumusan rencana program dan kegiatan Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 dan prakiraan maju tahun 2022 secara lebih lengkap disajikan pada tabel 3.1. Adapun kegiatan unggulan /prioritas yang akan menjadi fokus pelaksanaan kegiatan Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat tahun 2021 antara lain:

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2021
Dan Prakiraan Maju Tahun 2022
Provinsi Jawa Barat

Nama Perangkat Daerah : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	
	Program Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal	Laju Minat Investasi di Jawa Barat		5.8 Persen	8,829,300,000	APBD	
	Kegiatan Penyusunan Peta Potensi Peluang Investasi di Jawa Barat	Kajian Prospektus Investasi di Jawa barat		10 Dokumen	1,500,000,000	APBD	
	Kegiatan Promosi melalui Media Digital (Pemasaran Digital)	Jumlah Orang yang Terjangkau		30000 orang	466,000,000	APBD	
	Pelaksanaan Promosi melalui Media Elektronik	Jumlah orang yang melihat/mendengar		30000 orang	1,408,750,000	APBD	
	Kegiatan Pelaksanaan Kerjasama dan Pemberdayaan Usaha PMPTSP	Jumlah Peserta Matchmaking		200 orang	216,000,000	APBD	
	Penyusunan Peta Investasi Daerah	Peta Investasi Daerah yang tersebar di Jawa Barat		27 Kab/Kota	850,000,000	APBD	
	Kegiatan Penyusunan Bahan, Sarana dan Prasarana Promosi PMPTSP	Jumlah Bahan/Sarana/Prasarana Promosi PMPTSP		2 Paket	200,000,000	APBD	
	Kegiatan Pelaksanaan Promosi PMPTSP	Jumlah Pengunjung/Peserta/Tamu		250 orang	1,200,000,000	APBD	
	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Penanaman Modal	Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan dan Kebijakan PM		200 orang	200,000,000	APBD	
	Fasilitasi Penanaman Modal	Jumlah Fasilitasi PM		15 Kali	300,000,000	APBD	
	Pembuatan Bahan Layanan Informasi PM	Jumlah Audio Visual dan Placement ILM PMPTSP		1 produk tayangan dan placement	450,000,000	APBD	
	Kegiatan Evaluasi dan Monitoring Potensi Peluang Investasi yang Diminati Investor	Identifikasi Potensi Peluang Investasi yang Diminati Investor		27 Kab/Kota	200,000,000	APBD	
	Pembinaan Teknis Pemberdayaan Usaha UKM serta Fasilitasi Dunia Usaha Terkait Penanaman Modal	Jumlah Peserta Pembinaan Teknis		100 orang	150,000,000	APBD	
	Penyusunan Data Pelaku Usaha	Pembuatan Buku Profil Data Pelaku Usaha UMKM di Jawa Barat		1 Dokumen	100,000,000	APBD	
	Penyusunan Data Kawasan Industri di Jawa Barat	Jumlah Dokumen		1 Dokumen	100,000,000	APBD	
	Kegiatan Promosi melalui Media Cetak	Jumlah Orang yang Terjangkau		10000 orang	88,550,000	APBD	
	Kegiatan Lomba Penulisan Foto Potensi dan Peluang Investasi di Jawa Barat	Dokumen Potensi dan Peluang Investasi Baru di Jawa Barat (Hasil Penilaian)		1 Dokumen	200,000,000	APBD	
	Kegiatan Pembinaan Pengembangan PMPTSP di Jawa Barat	Jumlah Pelaksanaan Pembinaan		4 Kali	150,000,000	APBD	

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Jawa Barat Tahun 2021

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	
	Kegiatan Penyusunan Buku Direktori Investasi di Jawa Barat	Database Investasi di Jawa Barat		6 Buku	1,050,000,000	APBD	
	Program Pengendalian Penanaman Modal	Peningkatan Laju Realisasi Proyek Penanaman Modal		15 Persen	1,600,000,000	APBD	
	Kegiatan Pemantauan Proyek Penanaman Modal PMA/PMDN	Jumlah Perusahaan yang dibina		250 Perusahaan	500,000,000	APBD	
	Kegiatan Workshop / Helpdesk Ketentuan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Peserta Perusahaan		800 Perusahaan	600,000,000	APBD	
	Kegiatan Penyusunan Instrumen Pengendalian/Pengawasan	Instrumen Pengendalian Pengawasan		5 Instrumen	500,000,000	APBD	
	Program Penataan Regulasi PMPTSP	Kemudahan Prosedur dalam Mendapatkan Pelayanan Perizinan		78,0	2,475,000,000	APBD	
	Penyusunan Kajian Permasalahan Pengembangan Penanaman Modal dan PTSP	Dokumen Kajian Permasalahan		1 Dokumen	300,000,000	APBD	
	Kegiatan Penyusunan Regulasi PMPTSP	Perda/Perkada PMPTSP		3 Dokumen	350,000,000	APBD	
	Kegiatan Evaluasi Kebijakan Penanaman Modal dan PTSP di Jawa Barat	Dokumen Rekomendasi Perbaikan Kebijakan PM		1 Dokumen	250,000,000	APBD	
	Kegiatan Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan, Standar Operasional Prosedur, Maklumat Pelayanan dan Tim Teknis	Jumlah Dokumen		4 Dokumen	250,000,000	APBD	
	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Peserta Sosialisasi Peraturan dan Kebijakan Perizinan		200 orang	400,000,000	APBD	
	Fasilitasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Jumlah Fasilitasi PTSP		15 Kali	475,000,000	APBD	
	Pembuatan Bahan Layanan Infomasi PTSP	Jumlah Audio Visual dan Placement ILM PMPTSP		2 Produk/ Tayangan	450,000,000	APBD	
	Program Pelayanan Perizinan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	Tingkat Penyelesaian Perizinan Bidang ESDA yang tepat waktu		60 Persen	2,566,000,000	APBD	
	Kegiatan Peninjauan Lapangan Bersama Tim Teknis Pelayanan Bidang ESDA	Jumlah Perizinan yang Terlayani		550 Kali	1,983,750,000	APBD	
	Rapat Teknis Pelayanan Administrasi Perizinan Bidang ESDA	Laporan Hasil Pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis		115 Kali	132,250,000	APBD	
	Penyelenggaraan Layanan Pendampingan dan Konsultasi Terpadu (PeDeKaTe) Bidang ESDA	Pelayanan Perizinan Masyarakat di tempat		12 Kali	450,000,000	APBD	
	Program Pelayanan Perizinan Bidang Infrastruktur dan Sosial	Tingkat Penyelesaian Perizinan Bidang INSOS yang tepat waktu		60 Persen	2,450,000,000	APBD	
	Kegiatan Peninjauan Lapangan Bersama Tim Teknis Pelayanan Bidang INSOS	Jumlah Perizinan yang Terlayani		550 Kali	1,650,000,000	APBD	

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Jawa Barat Tahun 2021

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	
	Rapat Teknis Pelayanan Administrasi Perizinan Bidang INSOS	Laporan Hasil Penyelenggaraan Rapat		100 Kali	100,000,000	APBD	
	Penyelenggaraan Layanan Pendampingan dan Konsultasi Terpadu (PeDeKaTe) Bidang INSOS	Pelayanan Perizinan Masyarakat di tempat		24 Kali	700,000,000	APBD	
	Program Pengendalian dan Penanganan Permasalahan Perizinan	Tingkat Penyelesaian Permasalahan Perizinan		82 Persen	4,200,000,000	APBD	
	Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha berdasarkan OSS	Perizinan yang melalui OSS/Sektoral		75 Izin	750,000,000	APBD	
	Kegiatan Pemantauan dan Penyelesaian Komitmen berdasarkan OSS	Perusahaan yang memenuhi komitmen		80 Perusahaan	350,000,000	APBD	
	Kegiatan Pemantauan Perizinan tanpa OSS/Sektoral	Perusahaan yang memenuhi persyaratan		80 Perusahaan	350,000,000	APBD	
	Kegiatan Pengawasan Perizinan tanpa OSS/Sektoral	Perizinan yang tidak melalui OSS/Sektoral		60 Izin	550,000,000	APBD	
	Kegiatan Pembatalan / Pencabutan Perizinan Hasil Pengawasan	Pembatalan dan Pencabutan Izin		60 Izin	350,000,000	APBD	
	Kegiatan Forum Penyelesaian Permasalahan Teknis Perizinan Jawa Barat	Peserta Forum		100 Orang	250,000,000	APBD	
	Kegiatan Forum Interaksi Pengaduan dan Advokasi	Peserta Forum		100 Orang	250,000,000	APBD	
	Kegiatan Kajian Permasalahan Perizinan Sektoral	Kajian Permasalahan Perizinan Sektoral		1 Kajian	150,000,000	APBD	
	Kegiatan Forum Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal (Task Force)	Penanganan Permasalahan Penanaman Modal		35 Perusahaan	450,000,000	APBD	
	Kegiatan Penanganan Objek Berusaha yang tidak Berizin	Perusahaan yang taat terhadap peraturan perizinan		75 Perusahaan	400,000,000	APBD	
	Program Manajemen Data dan Informasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persentase Data dan Informasi yang Valid		85 Persen	4,614,521,775	APBD	
	Kegiatan Pengelolaan Bank Data Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pengumpulan Data PMPTSP melalui Bank Data		27 Kab/Kota	1,242,070,000	APBD	
	Kegiatan Pengembangan Tata Kelola Kearsipan	Data Base Historikal		1 Database	510,101,775	APBD	
	Kegiatan Sertifikasi ISO Pelayanan Perizinan	Sertifikasi ISO Pelayanan Perizinan		1 Dokumen	300,000,000	APBD	
	Pengembangan Sistem Call Center Pelayanan Perizinan	Pengembangan Sistem Call Center		3 Agent , 3 Work Station	762,350,000	APBD	
	Kegiatan Forum Replikasi dan Monitoring Sistem Aplikasi	Forum Replikasi SIMPATIK		1 Kali	150,000,000	APBD	
	Kegiatan Pengembangan Integrasi Data dengan Sistem Aplikasi Lainnya	Integrasi Data dengan Sistem Aplikasi Lainnya		1 Aplikasi	500,000,000	APBD	
	Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan PM	Dokumen Evaluasi dan Pelaporan PM		4 Dokumen	250,000,000	APBD	
	Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan PTSP	Dokumen Evaluasi dan Pelaporan PTSP		5 Dokumen	350,000,000	APBD	

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Jawa Barat Tahun 2021

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	
	Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan DPMPTSP	Dokumen Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi		1 Dokumen	250,000,000	APBD	
	Kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Dokumen Indeks Kepuasan Masyarakat		2 Dokumen	300,000,000	APBD	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		70 Persen	17,700,000,000	APBD	
	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas PMPTSP	Sarana dan Prasarana Dalam Mendukung Tugas dan Fungsi Dinas PMPTSP		12 Bulan	3,500,000,000	APBD	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana West Java Investment Center	Sarana dan Prasarana West Java Center		12 Bulan	1,500,000,000	APBD	
	Pembangunan Gerai/Kios Layanan Publik	Tersedianya Kios Pelayanan Publik di 27 Kab/Kota		27 Kab/Kota	2,700,000,000	APBD	
	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Persentase ASN yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		70 Persen	19,859,414,567	APBD	
	Kegiatan Peningkatan Kemampuan dan Kompetensi Aparatur Dinas PMPTSP	Peserta Peningkatan Kemampuan Aparatur		160 orang ASN DPMPTSP	605,000,000	APBD	
	Kegiatan Penyediaan Diklat, Kursus Singkat dan Bimtek Aparatur	Peserta Diklat, Kursus Singkat dan Bimtek		160 orang ASN DPMPTSP	350,000,000	APBD	
	Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga serta Pakaian Aparatur	Penyediaan Kerohanian dan Sarana dan Prasarana serta Pakaian Aparatur		160 orang ASN DPMPTSP	1,100,000,000	APBD	
		Persentase Saran dan Prasarana Dalam Kondisi Baik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		75 Persen		APBD	
	Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor	Penyediaan Barang Pakai Habis		12 Bulan	2,283,814,567	APBD	
	Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor dan Tenaga Kerja Non Pegawai	Kebutuhan Langganan Kantor		12 Bulan	3,850,000,000	APBD	
	Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	Jumlah Kendaraan Dinas yang Dipelihara		26 Mobil dan 30 Motor	468,600,000	APBD	
	Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor	Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor		12 Bulan	2,750,000,000	APBD	
	Kegiatan Pemeliharaan West Java Investment Center	Pemeliharaan Gedung West Java Investment Center		12 Bulan	1,000,000,000	APBD	
	Kegiatan Pemeliharaan Mobil Layanan Keliling	Pemeliharaan Mobil Layanan Keliling		12 Bulan	150,000,000	APBD	
	Kegiatan Pemeliharaan Kios Pelayanan Perizinan	Pemeliharaan Kios Pelayanan Perizinan		12 Bulan	50,000,000	APBD	

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Jawa Barat Tahun 2021

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	
	Peningkatan Gedung Kantor Pelayanan Perizinan Ruang Back Office dan Front Office	Moderenisasi Ruang Front Office dan Back Office Pelayanan Perizinan		100 Persen	1,000,000,000	APBD	
		Persentase Unit Kerja yang Mendapatkan Pelayanan Administrasi Perkantoran di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		90 Persen		APBD	
	Kegiatan Penyediaan Rapat dan Perjalanan Dinas	Kebutuhan Operasional Dasar Dalam Mendukung Tupoksi Dinas		12 Bulan	2,750,000,000	APBD	
	Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan beserta Peralatannya	Jasa Keamanan, Kebersihan, Operator dan Office Boy		12 Bulan	2,200,000,000	APBD	
		Persentase Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang tepat waktu dan sesuai peraturan perundang-undangan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		95 Persen		APBD	
	Kegiatan Penyelenggaraan Forum Perencanaan Tingkat Daerah	Terselenggaranya Kegiatan Musyawarah Koordinasi Teknis Kerjasama 3 Provinsi		6 Kali	247,500,000	APBD	
	Forum Perangkat Daerah	Terselenggaranya Forum Perangkat Daerah		1 Kali	302,500,000	APBD	
	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan	Dokumen Perencanaan yang Dihasilkan		4 Dokumen	110,000,000	APBD	
	Kegiatan Evaluasi Midterm RENSTRA Dinas PMPTSP	Dokumen RENSTRA Dinas PMTPSP Tahun 2018 - 2023		1 Dokumen	100,000,000	APBD	
	Kegiatan Revisi RENSTRA 2018 - 2023	Dokumen RENSTRA Dinas PMTPSP Tahun 2018 - 2023		1 Dokumen	100,000,000	APBD	
		Persentase Ketersediaan Data Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		100 Persen		APBD	
	Kegiatan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Dokumen yang dihasilkan		8 Dokumen	99,000,000	APBD	
	Penyelenggaraan Pameran Laporan Kegiatan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	Penyelenggaraan Pameran LKPJ		1 Kali	88,000,000	APBD	
	Kegiatan Pembinaan PMPTSP ke Kabupaten/Kota	Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan		14 Kab/Kota	200,000,000	APBD	

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Jawa Barat Tahun 2021

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	
	Penatausahaan Keuangan dan Aset Dinas PMPTSP	Dokumen Penatausahaan Keuangan		12 Dokumen	110,000,000	APBD	

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perumusan program dan kegiatan Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 mengacu kepada Rancangan Awal Renstra BKPM Tahun 2020 – 2024, RKPD Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021, Renstra Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023 dan Hasil evaluasi Renja Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat Tahun 2020. Dengan mengacu hal-hal tersebut di Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat telah merumuskan 9 (Sembilan) program, ... kegiatan beserta kerangka pendanaan indikatif. Melalui pelaksanaan program dan kegiatan tersebut diharapkan dapat mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat yaitu meningkatnya realisasi investasi dan meningkatnya kualitas pelayanan perizinan sesuai standar pelayanan publik.

Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat juga telah merumuskan kegiatan unggulan / prioritas yang akan menjadi fokus pelaksanaan kegiatan di tahun 2021. Adapun kegiatan unggulan/prioritas Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat tahun 2021, antara lain :

1.
2.

Rencana program, kegiatan dan kerangka pendanaan indikatif Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 secara lebih lengkap dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1
Rencana Program, Kegiatan dan Kerangka Pendanaan Tahun 2021

NO	Program / Kegiatan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rupiah)
I	Program Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal	8,829,300,000
1	Kegiatan Penyusunan Peta Potensi Peluang Investasi di Jawa Barat	1,500,000,000
2	Kegiatan Promosi melalui Media Digital (Pemasaran Digital)	466,000,000
3	Pelaksanaan Promosi melalui Media Elektronik	1,408,750,000
4	Kegiatan Pelaksanaan Kerjasama dan Pemberdayaan Usaha PMPTSP	216,000,000
5	Penyusunan Peta Investasi Daerah	850,000,000
6	Kegiatan Penyusunan Bahan, Sarana dan Prasarana Promosi PMPTSP	200,000,000
7	Kegiatan Pelaksanaan Promosi PMPTSP	1,200,000,000
8	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Penanaman Modal	200,000,000

NO	Program / Kegiatan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rupiah)
9	Fasilitasi Penanaman Modal	300,000,000
10	Pembuatan Bahan Layanan Informasi PM	450,000,000
11	Kegiatan Evaluasi dan Monitoring Potensi Peluang Investasi yang Diminati Investor	200,000,000
12	Pembinaan Teknis Pemberdayaan Usaha UKM serta Fasilitasi Dunia Usaha Terkait Penanaman Modal	150,000,000
13	Penyusunan Data Pelaku Usaha	100,000,000
14	Penyusunan Data Kawasan Industri di Jawa Barat	100,000,000
15	Kegiatan Promosi melalui Media Cetak	88,550,000
16	Kegiatan Lomba Penulisan Foto Potensi dan Peluang Investasi di Jawa Barat	200,000,000
17	Kegiatan Pembinaan Pengembangan PMPTSP di Jawa Barat	150,000,000
18	Kegiatan Penyusunan Buku Direktori Investasi di Jawa Barat	1,050,000,000
II	Program Pengendalian Penanaman Modal	1,600,000,000
1	Kegiatan Pemantauan Proyek Penanaman Modal PMA/PMDN	500,000,000
2	Kegiatan Workshop / Helpdesk Ketentuan Pelaksanaan Penanaman Modal	600,000,000
3	Kegiatan Penyusunan Instrumen Pengendalian/Pengawasan	500,000,000
III	Program Penataan Regulasi PMPTSP	2,475,000,000
1	Penyusunan Kajian Permasalahan Pengembangan Penanaman Modal dan PTSP	300,000,000
2	Kegiatan Penyusunan Regulasi PMPTSP	350,000,000
3	Kegiatan Evaluasi Kebijakan Penanaman Modal dan PTSP di Jawa Barat	250,000,000
4	Kegiatan Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan, Standar Operasional Prosedur, Maklumat Pelayanan dan Tim Teknis	250,000,000
5	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	400,000,000
6	Fasilitasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu	475,000,000
7	Pembuatan Bahan Layanan Informasi PTSP	450,000,000
IV	Program Pelayanan Perizinan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam	2,566,000,000
1	Kegiatan Peninjauan Lapangan Bersama Tim Teknis Pelayanan Bidang ESDA	1,983,750,000
2	Rapat Teknis Pelayanan Administrasi Perizinan Bidang ESDA	132,250,000
3	Penyelenggaraan Layanan Pendampingan dan Konsultasi Terpadu (PeDeKaTe) Bidang ESDA	450,000,000

NO	Program / Kegiatan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rupiah)
V	Program Pelayanan Perizinan Bidang Infrastruktur dan Sosial	2,450,000,000
1	Kegiatan Peninjauan Lapangan Bersama Tim Teknis Pelayanan Bidang INSOS	1,650,000,000
2	Rapat Teknis Pelayanan Administrasi Perizinan Bidang INSOS	100,000,000
3	Penyelenggaraan Layanan Pendampingan dan Konsultasi Terpadu (PeDeKaTe) Bidang INSOS	700,000,000
VI	Program Pengendalian dan Penanganan Permasalahan Perizinan	4,200,000,000
1	Kegiatan Pengawasan Perizinan Berusaha berdasarkan OSS	750,000,000
2	Kegiatan Pemantauan dan Penyelesaian Komitmen berdasarkan OSS	350,000,000
3	Kegiatan Pemantauan Perizinan tanpa OSS/Sektoral	350,000,000
4	Kegiatan Pengawasan Perizinan tanpa OSS/Sektoral	550,000,000
5	Kegiatan Pembatalan / Pencabutan Perizinan Hasil Pengawasan	350,000,000
6	Kegiatan Forum Penyelesaian Permasalahan Teknis Perizinan Jawa Barat	250,000,000
7	Kegiatan Forum Interaksi Pengaduan dan Advokasi	250,000,000
8	Kegiatan Kajian Permasalahan Perizinan Sektoral	150,000,000
9	Kegiatan Forum Penyelesaian Permasalahan Penanaman Modal (Task Force)	450,000,000
10	Kegiatan Penanganan Objek Berusaha yang tidak Berizin	400,000,000
VII	Program Manajemen Data dan Informasi Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4,614,521,775
1	Kegiatan Pengelolaan Bank Data Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1,242,070,000
2	Kegiatan Pengembangan Tata Kelola Kearsipan	510,101,775
3	Kegiatan Sertifikasi ISO Pelayanan Perizinan	300,000,000
4	Pengembangan Sistem Call Center Pelayanan Perizinan	762,350,000
5	Kegiatan Forum Replikasi dan Monitoring Sistem Aplikasi	150,000,000
6	Kegiatan Pengembangan Integrasi Data dengan Sistem Aplikasi Lainnya	500,000,000
7	Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan PM	250,000,000
8	Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan PTSP	350,000,000

NO	Program / Kegiatan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rupiah)
9	Evaluasi Implementasi Reformasi Birokrasi di Lingkungan DPMPSTP	250,000,000
10	Kegiatan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	300,000,000
VIII	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7,700,000,000
1	Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur Dinas PMPTSP	3,500,000,000
2	Pengadaan Sarana dan Prasarana West Java Investment Center	1,500,000,000
3	Pembangunan Gerai/Kios Layanan Publik	2,700,000,000
IX	Program Dukungan Manajemen Perkantoran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	19,914,414,567
1	Kegiatan Peningkatan Kemampuan dan Kompetensi Aparatur Dinas PMPTSP	605,000,000
2	Kegiatan Penyediaan Diklat, Kursus Singkat dan Bimtek Aparatur	350,000,000
3	Kegiatan Penyediaan Kerohanian, Sarana dan Prasarana Olahraga serta Pakaian Aparatur	1,100,000,000
4	Kegiatan Penyediaan Barang Habis Pakai Kantor	2,283,814,567
5	Kegiatan Penyediaan Langganan Kantor dan Tenaga Kerja Non Pegawai	3,850,000,000
6	Kegiatan Penyediaan Pemeliharaan Kendaraan Dinas	468,600,000
7	Kegiatan Pemeliharaan Perabotan, Fasilitas dan Gedung Kantor	2,750,000,000
8	Kegiatan Pemeliharaan West Java Investment Center	1,000,000,000
9	Kegiatan Pemeliharaan Mobil Layanan Keliling	150,000,000
10	Kegiatan Pemeliharaan Kios Pelayanan Perizinan	50,000,000
11	Peningkatan Gedung Kantor Pelayanan Perizinan Ruang Back Office dan Front Office	1,000,000,000
12	Kegiatan Penyediaan Rapat dan Perjalanan Dinas	2,750,000,000
13	Kegiatan Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan beserta Peralatannya	2,200,000,000
14	Kegiatan Penyelenggaraan Forum Perencanaan Tingkat Daerah	247,500,000
15	Forum Perangkat Daerah	302,500,000
16	Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan	110,000,000
17	Kegiatan Evaluasi Midterm RENSTRA Dinas PMPTSP	100,000,000
18	Kegiatan Revisi RENSTRA 2018 - 2023	100,000,000

NO	Program / Kegiatan	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif (Rupiah)
19	Kegiatan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	99,000,000
20	Penyelenggaraan Pameran Laporan Kegiatan Pertanggung Jawaban (LKPJ)	88,000,000
21	Kegiatan Pembinaan PMPTSP ke Kabupaten/Kota	200,000,000
22	Penatausahaan Keuangan dan Aset Dinas PMPTSP	110,000,000
	JUMLAH	54,349,236,342

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Renja Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 mengacu kepada Peraturan Mendagri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peratiran Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Renja Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat disusun sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan dinas pada tahun mendatang. Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan – kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan diantara semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah – kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Seluruh Bidang dan Sekretariat pada Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat dan Tim Teknis, berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat Tahun 2021, secara sinergitas dan terintegrasi.
2. Subbagian Perencanaan dan Pelaporan menyusun evaluasi, mengkaji dan menganalisis lebih lanjut pelaksanaan Renja Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 yang berdasarkan kepada laporan hasil evaluasi dari seluruh Bidang dan Sekretariat. Hasil evaluasi, kajian dan analisis Renja Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 menjadi bahan dasar penyusunan Renja Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat Tahun 2021.
3. Sebagai langkah awal dalam menyusun RAPBD Tahun 2021, Renja Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2021.
4. Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan pembangunan, setiap Bidang dan Sekretariat di lingkungan Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat wajib melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Renja Tahun 2021, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dan melakukan koreksi yang diperlukan serta melaporkan hasilnya secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Kepala Dinas, melalui Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan serta Sub Bagian Keuangan dan Aset.
5. Secara proaktif, Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, wajib melakukan monitoring dan mengkaji pelaksanaan Renja Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 serta menghimpun dan menganalisis laporan evaluasi Renja setiap 3 (tiga) bulan dan melaporkan hasil evaluasi Renja kepada Kepala Dinas.
6. Pada akhir tahun anggaran 2021, setiap Bidang dan Sekretariat wajib melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan Renja Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Barat Tahun 2021, sesuai dengan

tugas dan fungsinya masing-masing. Hasil evaluasi dilaporkan lebih lanjut kepada Kepala Dinas melalui Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan serta Sub Bagian Keuangan dan Aset.

7. Renja Dinas PMPTSP Provinsi Jawa Tahun 2021 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2021. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya, perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi Jawa Barat

Dr. Ir. H. DADANG MOHAMAD, MSCE
Pembina Utama
NIP 19601217 198511 1 002